

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini secara keseluruhan menemukan menyimpulkan bahwa proses lokalisasi norma yang dilakukan oleh pemerintah India dalam merespons norma pekerja anak (Konvensi No. 138 dan No. 182) dijalankan dengan proses negosiasi dan deliberatif melalui instrumen Amandemen *Child Labour Protection Act* (CLPR) pada tahun 2016. Proses lokalisasi ini lahir sebagai jalan kompromi atas posisi dilematis India. Di satu sisi, India menghadapi besarnya tekanan legitimasi global yang menuntut agar konvensi penghapusan pekerja anak segera diratifikasi. Namun di sisi lain, pemerintah menghadapi kuatnya resistensi *cognitive prior* di tingkat domestik, di mana masyarakat lokal masih memegang teguh nilai *seva*, *dharma*, serta struktur sosial yang menormalisasi keterlibatan anak dalam ekonomi moral keluarga.

Dalam upaya merespons norma pekerja anak global tersebut tanpa memicu penolakan sosial-ekonomi yang masif di dalam negeri, pemerintah India bertindak sebagai aktor negosiator (*insider proponents*) yang melakukan tiga mekanisme utama lokalisasi norma. Pertama, mekanisme pemangkasan (*pruning*), di mana pemerintah memodifikasi standar usia minimum, mengurangi daftar pekerjaan berbahaya secara drastis, serta menciptakan celah pengecualian hukum bagi anak-anak yang bekerja

dalam lingkup "usaha keluarga" melalui Pasal 3(2)(a). Kedua, mekanisme pemingkakan (*framing*), di mana pergeseran norma dibingkai ulang secara legal dengan menggunakan kata "membantu" keluarga sebagai bentuk partisipasi sukarela dan transmisi keterampilan, alih-alih menyebutnya sebagai eksploitasi. Ketiga, pencangkokan (*grafting*), dengan menyelaraskan pengecualian hukum tersebut agar terlihat sejalan dengan pelestarian tradisi dan nilai kultural keluarga di India.

Pada akhirnya, proses lokalisasi norma melalui Amandemen 2016 ini berfungsi sebagai prasyarat domestik yang memungkinkan India untuk melakukan ratifikasi konvensi ILO secara formal di tahun 2017. Meskipun secara *de jure* India berhasil mengamankan reputasi dan menunjukkan kepatuhannya di mata internasional, strategi lokalisasi ini secara *de facto* justru memberikan legitimasi hukum terhadap praktik pekerja anak dalam lingkup usaha keluarga. Hal ini menegaskan bahwa proses lokalisasi norma di India berujung pada kompromi yang mempertahankan kompleksitas masalah perlindungan anak secara keseluruhan.

#### **4.2 Saran Penelitian**

Penelitian ini telah menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana proses lokalisasi norma dilakukan oleh pemerintah India dalam kebijakannya terkait penghapusan pekerja anak. Penerapan teori Konstruktivisme, secara spesifik melalui kerangka Lokalisasi Norma

(*Norm Localization*) dari Amitav Acharya, terbukti efektif dalam menganalisis bagaimana negara menghadapi tekanan internasional sambil tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai lokalnya. Sebagai rekomendasi bagi studi mendatang, diharapkan para akademisi dalam bidang Hubungan Internasional dapat mengembangkan penelitian ini secara lebih mendalam di lapangan. Mengingat bahwa penelitian ini berdasarkan pada tinjauan pustaka yang menitikberatkan pada institusi negara formal, penelitian berikutnya bisa meneliti peran aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil atau kelompok advokasi di tingkat pemerintahan terkecil (sub-nasional) untuk memahami sejauh mana proses negosiasi norma ini benar-benar diterima dan diadaptasi oleh komunitas lokal.

Di samping itu, terdapat juga rekomendasi praktis untuk para pembuat kebijakan. Pemerintah India disarankan untuk segera menyelaraskan definisi “anak” yang terdapat dalam berbagai regulasi dan kebijakan nasional, memperjelas batasan operasional dari klausul usaha keluarga pada Pasal 3(2)(a), serta memperbaiki metode survei ketenagakerjaan nasional (PLFS), agar dapat mengidentifikasi pekerja anak berbasis gender yakni perempuan, yang sering kali tidak ter data di sektor domestik. Di sisi lain, ILO dan organisasi internasional perlu mengubah pendekatan regulasi yang bersifat dari atas ke bawah atau *top-down*, menjadi pendekatan pembelajaran sosial yang bersifat kolaboratif

dan dari bawah ke atas atau *bottom-up*. Program pemberdayaan komunitas, juga harus dirancang dengan cara yang tidak menentang nilai-nilai lokal dan mengintegrasikannya agar pendidikan dapat sejalan dengan kegiatan ekonomi keluarga yakni bekerja.